

Pengaruh Upah Minimum, Investasi, dan Belanja Pemerintah terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Banten Periode 2006-2020

Muhamad Saiful Islam Zulfikar*, Meidy Haviz

Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*saifulzulfikar1717@gmail.com, meidyhaviz@gmail.com

Abstract. This study aims to determine the effect of the minimum wage, investment, and government spending on the unemployment rate in Banten Province for the period 2006-2020. Indonesia's open unemployment rate is spread across every province in Indonesia. One of them is Banten Province. Looking at the Banten area, based on BPS data, it is indicated that the unemployment rate in Banten Province is the highest in Indonesia since 2018-2019 with a percentage rate of 8.47 and 8.11% and the second highest in Indonesia after DKI Jakarta in 2020 with a percentage of 10,64 percent. The research method used is a quantitative descriptive approach with time series data. The analysis model is using the OLS (Ordinary Least Square) model. The data collection technique used is secondary data from BPS Banten Province, and the Ministry of Finance. The results of the study show that the effect of the minimum wage, investment, and government spending variables on unemployment in Banten Province can be seen from the probability value of the partial test and the simultaneous test. The partial estimation results obtained that the minimum wage (X1) has no significant effect and is positively related to the unemployment rate (Y) in Banten Province at a significance level of 5%. The second variable, investment (X2) has a significant and positive relationship to the open unemployment rate (Y) in Banten Province at a significance level of 5%. The third variable, government or regional spending (X3) in Banten Province has a significant and negative effect on the open unemployment rate (Y) in Banten Province at a significance level of 5%. Meanwhile, the results of the simultaneous test show that the three independent variables (minimum wage, investment, and government spending) simultaneously have a significant effect on the unemployment rate in Banten Province at the 95% confidence level.

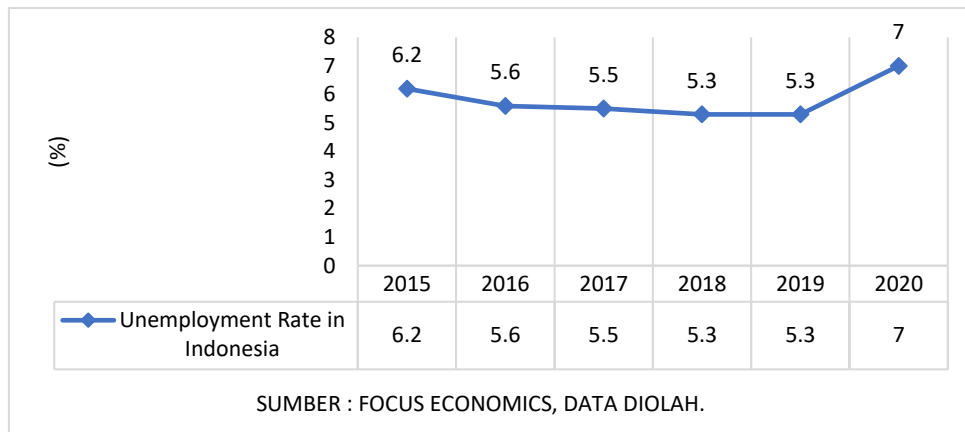
Keywords: *Minimum Wage, Investment, Government Expenditure, and Unemployment Rate*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh upah minimum, investasi, dan belanja pemerintah terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Banten periode 2006-2020. Tingkat pengangguran terbuka Indonesia tersebar di setiap provinsi di Indonesia. Salah satunya Provinsi Banten. Menilik pada daerah Banten, berdasarkan data BPS, terindikasi bahwa tingkat pengangguran di Provinsi Banten merupakan tertinggi di Indonesia sejak 2018-2019 dengan tingkat persentase 8,47 dan 8,11% dan tertinggi kedua di Indonesia setelah DKI Jakarta di tahun 2020 dengan persentase 10,64 persen. Metode penelitian yang dipakai menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan data time series. Adapun Model analisis yakni menggunakan model OLS (Ordinary Least Square). Teknik pengumpulan data yang diambil adalah data sekunder yang berasal dari BPS Provinsi Banten, dan Kemenkeu. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh yang diberikan oleh variabel upah minimum, investasi, dan belanja pemerintah terhadap pengangguran di Provinsi Banten dapat dilihat dari nilai probabilitas uji parsial dan uji simultan. Hasil estimasi secara parsial diperoleh upah minimum (X1) tidak berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap tingkat pengangguran (Y) di Provinsi Banten pada tingkat signifikansi 5%. Variabel kedua, investasi (X2) berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap tingkat pengangguran terbuka (Y) di Provinsi Banten pada tingkat signifikansi 5%. Variabel ketiga, belanja pemerintah atau daerah (X3) di Provinsi Banten berpengaruh signifikan dan berhubungan negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka (Y) di Provinsi Banten pada tingkat signifikansi 5%. Sedangkan, hasil penelitian uji simultan menunjukkan bahwa ketiga variabel independen (upah minimum, investasi, dan belanja pemerintah) secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Banten pada tingkat kepercayaan 95%.

Kata Kunci: Upah Minimum, Investasi, Belanja Pemerintah, dan Tingkat Pengangguran.

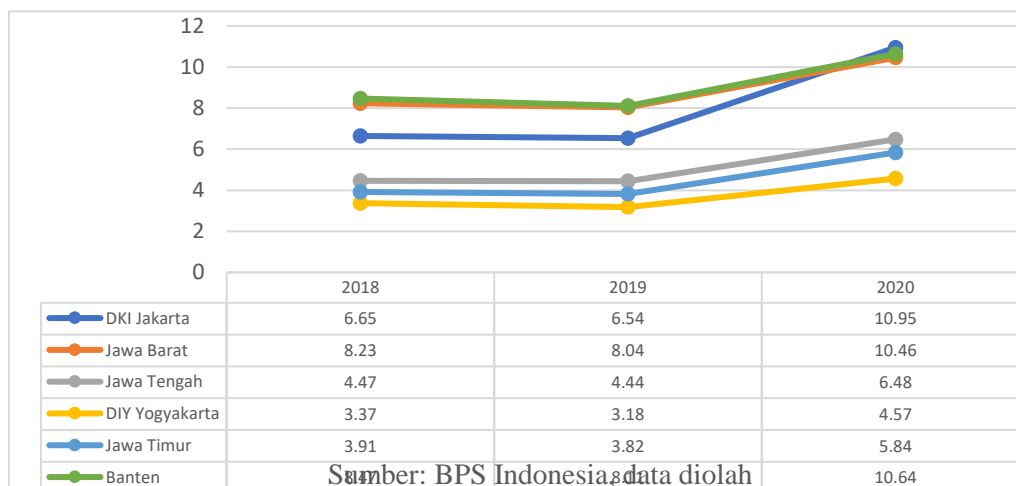
A. Pendahuluan

Masalah pengangguran merupakan masalah yang kompleks terutama bagi negara-negara berkembang, sehingga tidak bisa dihilangkan namun bisa diminimalisir. Sukirno (2011) tingkat pengangguran tenaga kerja penuh tercapai apabila tingkat penganggurannya dalam perekonomian kurang dari 4 (empat) persen.



Gambar 1. Unemployment Rate of Indonesia (2015-2020)

Berdasarkan grafik di atas, tingkat pengangguran Indonesia tahun 2020 meningkat sebesar 1,7% dari tahun sebelumnya. Di negara berkembang, pembangunan ekonomi yang tercipta belum mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak dari pada pertambahan jumlah penduduk. Masalah pengangguran yang dihadapi negara berkembang dari tahun ke tahun semakin serius. Berdasarkan grafik dibawah, pada tahun 2018 tingkat pengangguran Provinsi Banten kontributor terbesar di Indonesia di mana tingkat penganggurannya berada di atas rata-rata nasional. Pada tahun 2019 Banten merupakan penyumbang tertinggi tingkat pengangguran di Indonesia walaupun tingkat penganggurannya menurun sebesar 0,36 persen dari tahun sebelumnya sedangkan rata-rata tingkat pengangguran nasional sebesar 5,23 persen. Sedangkan sepanjang tahun 2020 saat pandemi Covid-19 dan krisis ekonomi melanda Indonesia, kontributor tertinggi tingkat pengangguran Indonesia di pegang oleh DKI Jakarta 10,95 persen kemudian disusul oleh Provinsi Banten 10,46 persen. Terjadi kenaikan tingkat pengangguran di Provinsi Banten sebesar 2,35 persen pada tahun 2019-2020. Artinya, meskipun tahun 2020 Provinsi DKI kontributor tertinggi di Indonesia akan tetapi selama tiga tahun tersebut Provinsi Banten merupakan kontributor terbesar dalam tingkat pengangguran di Indonesia.



Gambar 2. Tingkat Pengangguran se-Pulau Jawa Tahun 2018-2020

Berdasarkan grafik diatas, masalah pengangguran terdapat di hampir seluruh provinsi di kepulauan Indonesia, salah satunya adalah Provinsi yang berada di Pulau Jawa yaitu Provinsi Banten. Pada tahun 2018-2019 jumlah pengangguran di Provinsi Banten menduduki posisi pertama di Jawa walaupun tingkat penganggurannya turun sebesar 0,36. Tingkat pengangguran di setiap Provinsi mengalami penurunan pada tahun 2019 akan tetapi pada tahun 2020 mengalami kenaikan yang signifikan disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan perusahaan mengurangi jumlah tenaga kerja. Akibat dari pandemi tersebut pada tahun 2020 tingkat pengangguran di Provinsi Banten meningkat 2,53 persen dari tahun sebelumnya. Sejak tahun 2018 hingga tahun 2019 Provinsi Banten terus menduduki tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia diakibatkan banyak industri luar datang membawa pekerja sendiri yang mengakibatkan warga lokal menganggur. Pemerintah Provinsi Banten dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banten hingga saat ini belum merespon terkait penanganan persoalan tingginya angka pengangguran di Banten (Kompas, 2021).

Setiap kenaikan tingkat upah akan diikuti oleh turunnya tenaga kerja yang diminta, yang berarti akan menyebabkan meningkatnya pengangguran (Alghofari, 2010).

Tabel 1. Perkembangan UMP Provinsi di Pulau Jawa 2018-2020 (dalam Rp)

PROVINSI	UMP 2018	UMP 2019	UMP 2020
Dki Jakarta	3.648.035	3.940.973	4.267.349
Jawa Barat	1.544.360	1.668.372	1.810.350
Jawa Tengah	1.486.065	1.605.396	1.742.015
Di Yogyakarta	1.454.154	1.570.922	2.004.000
Jawa Timur	1.508.894	1.630.059	1.768.777
Banten	2.099.385	2.267.965	2.460.968

Sumber: <https://finance.detik.com>, data diolah.

Berdasarkan data di atas, tahun 2018-2020 upah minimum Provinsi yang paling tinggi dipegang oleh Provinsi DKI Jakarta dan Banten. Walaupun setiap tahunnya upah minimum Provinsi Banten meningkat sebesar hampir Rp.200 ribu. Artinya, jika mengacu pada pernyataan Alghofari (2010) yang menyatakan setiap kenaikan tingkat upah akan diikuti oleh turunnya tenaga kerja yang diminta, yang berarti akan menyebabkan meningkatnya pengangguran, Faktanya memang benar Provinsi Banten menjadi Provinsi dengan tingkat pengangguran yang tinggi di setiap tahunnya. Pada tahun 2019 tingkat upah minimum provinsi Banten meningkat sebesar Rp. 168 ribu atau meningkat 8,03 persen, tingkat pengangguran provinsi Banten mengalami penurunan sebesar 0,36 persen pada tahun 2019. Artinya, terjadi penurunan pengangguran pada tahun tersebut meski upah minimum meningkat. Hal ini bertentangan dengan pernyataan Alghofari (2010). Namun demikian, pada tahun 2020 upah minimum Provinsi Banten mengalami peningkatan. Akan tetapi, tingkat pengangguran di Banten juga meningkat. Salah satu faktor penyebabnya yaitu terjadinya krisis ekonomi akibat dampak dari Pandemi Covid-19 yang membuat perusahaan banyak yang merumahkan dan melakukan PHK besar-besaran kepada karyawannya untuk mengurangi biaya operasional perusahaan. Jika mengacu ke pernyataan Alghofari (2010) sesuai dengan fakta di lapangan Provinsi Banten. Upah minimum Provinsi Banten sangat tinggi dari upah minimum di provinsi lainnya bahkan setiap tahunnya meningkat akan tetapi tingkat pengangguran di Banten masih menjadi tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia.

Tabel 2. Data Tingkat Pengangguran Terbuka dan Investasi Provinsi Banten 2006-2020

Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka Prov. Banten (%)	Investasi Prov. Banten (Milyar Rupiah)
2006	18,91	3 815,0
2007	15,75	1 068,0
2008	15,18	1 989,0
2009	14,97	4 381,7
2010	13,68	5 852,5
2011	13,06	4 298,6
2012	10,13	5 117,5
2013	9,90	4 008,7
2014	9,07	8 081,3
2015	9,55	10 709,9
2016	8,92	12 426,3
2017	9,28	15 141,9
2018	8,47	18 637,6
2019	8,11	20 708,4
2020	10,64	31 145,7

Sumber: BPS Indonesia, data diolah

Berdasarkan data yang didapatkan, pada tahun 2015 secara persentase jumlah pengangguran meningkat dari 9,07 persen menjadi 9,55 persen atau 0,45 persen lebih dari tahun sebelumnya. Peningkatan angka pengangguran ini tidak lepas dari inflasi dan anjloknya nilai tukar rupiah (Suhaimi, 2015). Pada tahun 2017 angka pengangguran Provinsi Banten mengalami peningkatan sebesar 0,36 persen disebabkan di Provinsi Banten banyak terdapat lapangan pekerjaan yang menarik migran untuk masuk ke Banten. Banyaknya migran masuk yang mencari pekerjaan ini tidak semuanya terserap oleh pasar kerja sehingga menambah jumlah pengangguran di Banten (BPS Prov. Banten, 2017). Kemudian pada tahun 2020 penyebab angka pengangguran Banten sangat tinggi di antaranya Indonesia sudah terdampak dari kasus Covid-19 akibat penerapan lockdown mengakibatkan kegiatan ekspor dan impor terhenti membuat stok bahan industri berkurang sehingga terjadi pengangguran karyawan.

Pengeluaran pemerintah daerah diukur dari total belanja rutin dan belanja pembangunan yang dialokasikan dalam anggaran daerah. Semakin besar pengeluaran pemerintah daerah yang produktif maka semakin memperbesar tingkat perekonomian suatu daerah (Wibisono, 2012). Salah satu cara untuk memicu kegiatan ekonomi adalah melalui belanja pemerintah.

Tabel 3. Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Banten tahun 2006-2020 (milyar rupiah)

Tahun	Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Banten (miliar Rp), 2006–2020
2006	1.812.000
2007	1.867.000
2008	2.225.400
2009	2.420.000
2010	2.834.000
2011	3.901.000
2012	5.317.000
2013	5.295.000
2014	6.192.000
2015	8.084.000

2016	8.811.000
2017	9.512.000
2018	9.992.000
2019	11.324.000
2020	13.214,000

Sumber : BPS Prov. Banten, data Diolah

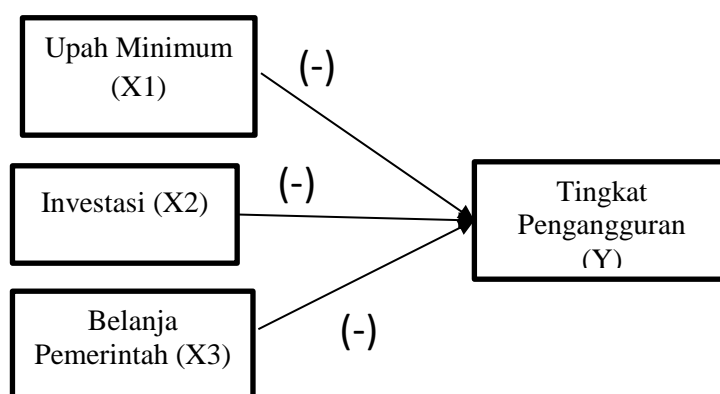
Berdasarkan tabel tingginya pengeluaran pemerintah diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah dan mengurangi pengangguran yang selalu bertambah di setiap tahunnya. Karena masalah pengangguran masih menjadi salah satu masalah yang belum dapat diselesaikan, hal ini diakibatkan karena jumlah penduduk dan angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan yang tinggi tidak seimbang dengan lapangan kerja yang ada. Belanja pemerintah merupakan salah satu ukuran yang mempengaruhi perekonomian dan bentuk stimulus yang dilakukan pemerintah pada tahap awal perkembangan. Hal ini terkait bahwa belanja pemerintah mempunyai peranan sebagai instrumen fiskal melalui fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Pertumbuhan suatu perekonomian tidak bisa lepas dari peran pemerintah. Maka kebijakan pengeluaran pemerintah ini dituangkan dalam APBD. Kebijakan pengeluaran pemerintah daerah dalam APBD tercermin dari total belanja pemerintah yang dialokasikan dalam anggaran daerah. Pengeluaran pemerintah yang terlalu kecil akan merugikan pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah yang proposional akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah yang boros akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana pengaruh upah minimum, investasi, dan belanja pemerintah terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Banten?”, dan “Berapa besar pengaruh upah minimum, investasi, dan belanja pemerintah terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Banten?” Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui pengaruh upah minimum, investasi, dan belanja pemerintah terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Banten
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh upah minimum, investasi, dan belanja pemerintah terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Banten.

B. Metodologi Penelitian

Peneliti menggunakan metode data *time series* serta diuji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji linieritas, uji multikolinieritas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari Badan Pusat Statistik RI, Badan Pusat Statistik Banten, *Unemployment Rate of Indonesian*, dan sumber berasal dari berita yakni *finance.detik.com* serta lembaga lainnya yang memiliki keterkaitan dengan topik penulis selama 15 tahun. Dengan hipotesis yang dibentuk sebagai berikut :

1. Terdapat hubungan yang negatif dan signifikan antara upah minimum dengan tingkat pengangguran Provinsi Banten
2. Terdapat hubungan yang negatif dan signifikan antara investasi dengan tingkat pengangguran Provinsi Banten
3. Terdapat hubungan yang negatif dan signifikan antara belanja pemerintah dengan tingkat pengangguran Provinsi Banten



Gambar 3. Model Hipotesis

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Metode analisis yang digunakan adalah *Ordinary Least Square (OLS)*. Analisis ini menjelaskan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, untuk mengetahui hubungan tersebut Model regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$U_t = \beta_0 + \beta_1 W_t + \beta_2 I_t + \beta_3 G_t + v_t$$

Dimana :

U : Tingkat Pengangguran

W : Upah Minimum

I : Investasi

G : Belanja Pemerintah

V_t : Periode Waktu (t = 1,2,3 ...n)

Berdasarkan hasil perhitungan statistic didapatkan hasil estimasi model sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Estimasi Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	84.79216	7.784340	10.89266	0.0000
WAGE	0.178266	0.551364	0.323319	0.7525
INV	2.033888	0.842041	2.415427	0.0343
GOV	-6.973080	1.176932	-5.924792	0.0001

Sumber: Hasil Olah Data dengan *EViews 9*, 2021

Berdasarkan hasil regresi data time series menggunakan e-views yang terdapat pada tabel 1 dijelaskan melalui analisis deskriptif sebagai berikut:

Hasil Uji t-statistik

1. Hasil probabilitas upah minimum sebesar 0.7525 pada tingkat signifikan $\alpha = 0,05$ menunjukkan $0.7525 > 0,05$, maka H_0 diterima, artinya pada tingkat kepercayaan 95 persen tidak terdapat pengaruh antara upah minimum secara signifikan terhadap tingkat pengangguran Provinsi Banten.
2. Hasil probabilitas pada variabel investasi memperoleh hasil sebesar 0,0343 pada tingkat signifikan $\alpha = 0,05$ menunjukkan $0,0343 < 0,05$, maka H_0 ditolak. Artinya pada tingkat kepercayaan 95 persen terdapat pengaruh antara variabel investasi secara signifikan terhadap tingkat pengangguran Provinsi Banten.

- Hasil probabilitas pada variabel belanja pemerintah diperoleh hasil sebesar 0,0019 dengan tingkat signifikan $\alpha = 0,05$ menunjukkan $0,0019 < 0,05$. Maka H_0 ditolak. Artinya pada tingkat kepercayaan 95 persen terdapat pengaruh secara signifikan antara variabel belanja pemerintah dengan tingkat pengangguran Provinsi Banten.

Hasil Uji F-statistik

Uji F dilakukan untuk mengetahui besarnya pengaruh dari seluruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Jika nilai probabilitas $F <$ taraf signifikansi 5%, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut :

Tabel 5. Hasil Uji F-Statistik

<i>F-statistic</i>	30.45889
<i>Prob(F-statistic)</i>	0.000013

Berdasarkan Tabel 5 diperoleh hasil probabilitas F-statistic sebesar 0.000013 yang artinya nilai probabilitas kurang dari 0,05 (tingkat signifikansi) maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen pada penelitian ini secara bersama sama mempengaruhi variabel dependen.

Koefisien Determinasi

Dengan menggunakan program *E-views* 9, diperoleh estimasi R^2 0.892554 menandakan bahwa 89,25 persen tingkat pengangguran di Provinsi Banten dipengaruhi oleh upah minimum, investasi, dan belanja pemerintah. Sedangkan sisanya 10,75 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian.

Pengaruh Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Banten

Berdasarkan dari hasil uji t upah minimum tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Banten. Hal ini terjadi karena kondisi upah pada Provinsi Banten bersifat kaku. Kekakuan upah ini disebabkan karena adanya penetapan upah minimum yang dilakukan oleh pemerintah setempat yang tidak sesuai dengan pasar dan lebih tepatnya akan sangat mahal menegosiasikan upah tiap minggu atau tiap bulan serta adanya kekuatan dari serikat kerja yang ingin meningkatkan kesejahteraan mereka dengan adanya permintaan peningkatan upah minimum (Mankiw, 2006).

Pengaruh Investasi Terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Banten

Hasil uji t investasi berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Banten. Hal ini disebabkan karena investasi di Provinsi Banten lebih mengarah pada sektor padat modal bukan padat karya, sehingga kenaikan investasi yang didorong sektor penggunaan teknologi tidak menyerap tenaga kerja, sedangkan disisi lain pertambahan jumlah penduduk semakin meningkat. Menurut teori ekonomi investasi sebagai pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan (Andriyanto, 2017).

Pengaruh belanja Pemerintah Terhadap tingkat Pengangguran di Provinsi Banten

Hasil uji t belanja pemerintah Provinsi Banten berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran. Belanja daerah dapat menciptakan multiplier effect pada sektor-sektor perekonomian lain. Semakin besar belanja yang dilakukan untuk kegiatan produktif, maka semakin besar pula multiplier effect yang ditimbulkan. Penyebabnya adalah, ketika belanja yang dilakukan oleh daerah semakin besar maka dapat menstimulus kegiatan perekonomian serta mampu mengurangi pengangguran dari adanya multiplier effect yang dihasilkan.

Belanja daerah Provinsi Banten dapat memunculkan multiplier effect terhadap tingkat pengangguran Provinsi Banten. Peningkatan belanja daerah provinsi Banten akan mengakibatkan turunnya tingkat pengangguran. Jadi, Ketika belanja digunakan untuk belanja modal, seperti tanah, Kemudian didirikan sebuah pabrik, dengan adanya pabrik maka akan

dibutuhkan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja ini yang kemudian mengurangi jumlah pengangguran. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Aam (2018) menyimpulkan pengeluaran atau belanja pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran di Jawa Barat. Peningkatan pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk program pembangunan yang bertujuan memperluas kesempatan kerja, akan menurunkan pengangguran terbuka di Jawa Barat.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah diuraikan, maka didapatkan kesimpulan untuk menjawab identifikasi masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pengaruh yang diberikan oleh variabel upah minimum, investasi, dan belanja pemerintah terhadap pengangguran di Provinsi Banten dapat dilihat dari nilai probabilitas uji parsial dan uji simultan. Hasil estimasi secara parsial diperoleh upah minimum (X1) tidak berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap tingkat pengangguran (Y) di Provinsi Banten pada tingkat signifikansi 5%. Variabel kedua, investasi (X2) berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap tingkat pengangguran terbuka (Y) di Provinsi Banten pada tingkat signifikansi 5%. Variabel ketiga, belanja pemerintah atau daerah (X3) di Provinsi Banten berpengaruh signifikan dan berhubungan negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka (Y) di Provinsi Banten pada tingkat signifikansi 5%. Sedangkan, hasil penelitian uji simultan menunjukkan bahwa ketiga variabel independen (upah minimum, investasi, dan belanja pemerintah) secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Banten pada tingkat kepercayaan 95%.
2. Dari hasil estimasi diperoleh nilai R^2 0.892554 menandakan bahwa 89,25 persen tingkat pengangguran Provinsi Banten dipengaruhi oleh upah minimum, investasi, dan belanja pemerintah. Sedangkan sisanya 10,75 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian.

Acknowledge

1. Allah SWT atas segala limpahan rahmat, rezeki, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Kedua orang tua saya yang tiada henti dalam berdo'a, memberikan dorongan motivasi dan nasihat, serta yang dengan ikhlas membiayai uang kuliah penulis agar penulis bisa mengenyam pendidikan tinggi demi masa depan yang cerah.
3. Kaka tercinta, Muhammad Riznaldy Nur Irsyad yang memberikan semangat kepada penulis, serta anggota keluarga dan kerabat yang juga senantiasa memberikan doa dan motivasi kepada penulis.
4. Sahabat penulis yakni Nirma Hendra Tri Agustin, Rahmad Abdul Gani, S.E., Wafin Renaldi, Adrian Zulfikar yang selalu memberikan bantuan, dukungan, semangat, dan motivasi kepada penulis.
5. Teman-teman kuliah lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah memberikan pengalaman berharga kepada penulis.
6. Ibu Dr. Hj. Ima Amaliah S.E., M.Si sebagai Ketua Prodi Ekonomi Pembangunan dan dosen pembimbing I yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dan selalu sabar mengingatkan penulis, memberikan arahan, motivasi, perhatian dan apresiasi hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
7. Bapak Meidy Haviz, S.E., M.Si., M.Si sebagai dosen pembimbing II yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan sangat sabar hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Ibu Ria Hariyatningsih, S.E., M.T., sebagai dosen wali yang telah memberikan dukungan, arahan, dan motivasi sejak awal penulis masuk kuliah.
9. Ibu Dr. Nurfahmiyati, S.E., M.Si, yang selalu memberikan perhatian dan motivasi semangat kepada Penulis, hingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

10. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Ekonomi FEB UNISBA yaitu Ibu Prof. Dr. Atih Rohaeti, SE., M.Si, Ibu Noviani, SE., M.Si, Ibu Dr. Asnita Frida Sebayang, S.E., M.Si , Ibu Hj. Westi Riani, SE., ME., Sy., Ibu Aan Julia, S.E., M.Si Serta bapak Yuhka Sundaya, S.E., M.Si.
11. Ibu Poppi selaku Manajer Unit Pengendalian Inflasi Daerah KPW Bank Indonesia Jawa Barat yang telah membimbing Penulis selama Magang dengan baik, sabar, dan ramah hingga menjadi suatu pengalaman berharga bagi Penulis.
12. Teteh Mentari selaku staff RIRU KPW Bank Indonesia Jawa Barat yang telah membimbing Penulis dan memberikan kepercayaan kepada Penulis dalam tugas Magang hingga menjadi pengalaman berharga bagi Penulis.
13. Teman-teman Garagas Gang yang telah memberikan masukan dan pengalaman berharga kepada Penulis selama di Komunitas.

Daftar Pustaka

- [1] Andriyanto, B. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Regional, Investasi Terhadap Pengangguran Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2017.
- [2] Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. 2006-2020. Data UMP Provinsi Banten. Di akses pada: <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/917>
- [3] Badan Pusat Statistik RI. 2006-2020. Data Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri Menurut Provinsi. Diakses pada: <https://www.bps.go.id/indicator/13/793/1/realisasi-investasi-penanaman-modal-dalam-negeri-menurut-provinsi-investasi-.html>
- [4] Badan Pusat Statistik RI. 2006-2020. Data Tingkat Pengangguran Terbuka Indonesia Menurut Provinsi. Diakses pada: <https://www.bps.go.id/indicator/6/543/1/tingkat-pengangguran-terbuka-menurut-provinsi.html>
- [5] Basori, I. (2020). Pengaruh Investasi Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sumatera Utara (Doctoral Dissertation, Iain Padangsidimpuan).
- [6] Chandra, A. S., Yulmardi, Y., & Erfit, E. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Penduduk, Inflasi, Investasi, Upah Minimum Dan Kesempatan Kerja Terhadap Pengangguran Di Kota Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 15(2), 197–212. <https://doi.org/10.22437/Paradigma.V15i2.10321>
- [7] Helvira, R., & Rizki, E. P. (2020). Pengaruh Investasi, Upah Minimum Dan Ipm Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Kalimantan Barat. *E-Jurnal Iain Pontianak*, 1(1), 53–62.
- [8] Kurniawan, M. D. (2020). Analisis Faktor–faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran di Indonesia Periode 2014–2018.
- [9] Lubis, N. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Di Provinsi Sumatera Barat. 2(1), 34–47.
- [10] Mankiw, Gregory. N. 2007. Pengantar Ekonomi Makro, Edisi kelima. Jakarta : Salemba Empat.